



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumselfprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselfprov.go.id

Palembang, 06 Juli 2026

Nomor : 900.1.3/ 03651 /BPKAD-I/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Pembangunan Tahun Anggaran 2026

Yth. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
c.q. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan
di
Palembang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan kepada Saudara Laporan Pelaksanaan Pembangunan sampai dengan Bulan Juni 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah,

H. Yossi Hervandi, SE.,M.M.,CGAA
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
								(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN KEUANGAN														
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	%	100	45,96	127.641.223.754,00	94.712.636.736,00	15.667.183.018,00	16,54	45,96				
i	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	50,00	903.972.000,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	50,00				
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Peta Resiko, SPP, PUG, JPkd, RB, Paparan Komisi, PK, LKJIP, Renja Induk, Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPA, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Money Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi	22	11	903.972.000,00	933.972.000,00	283.924.480,00	30,40	50,00	PAD	Pig		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	%	100	57,92	64.039.604.404,00	63.303.964.404,00	10.817.126.370,00	17,09	57,92				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	172	83 ASN dan 72 P3K	62.457.124.404,00	61.657.124.404,00	9.989.021.982,00	16,20	48,00	DAU	Pig		
3	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	60	30	1.332.480.000,00	1.276.840.000,00	616.084.500,00	48,25	50,00	PAD	Pig		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tema/ik	Faktor Penghambat/ Pendorong
								(Rp)	(%)					
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan (Laporan Keuangan Unaudit dan Audited, LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD, Rekon Akuntansi/Semester, Dokumen Kartu Kendali/semester, RKBMD, Laporan Rekon Per Triwulan, Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	27	9	250.000.000,00	370.000.000,00	212.019.888,00	57,30	75,75	PAD	Plg		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100,00	270.000.000,00	140.000.000,00	132.483.887,00	94,63	100,00				
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	1	1	270.000.000,00	140.000.000,00	132.483.887,00	94,63	100,00	PAD	Plg		
iv	Administrasi Perangkat Kepegawaian Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	26,43	350.000.000,00	405.101.158,00	68.448.550,00	16,90	26,43				
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen (SKP pertubulan dan SKP Tahunan, Anjab, ABK, Eyjab, Penataan Arsip Dinamis)	28	12	250.000.000,00	305.101.158,00	59.723.550,00	19,57	42,86	PAD	Plg		
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	2	100.000.000,00	100.000.000,00	8.725.000,00	8,73	10,00	PAD	Plg		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	%	100	44,21	5.412.000.000,00	6.947.000.000,00	1.967.441.760,00	28,32	44,21				
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas)	4	1	500.000.000,00	500.000.000,00	230.681.000,00	46,14	47,00	PAD	Plg		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
								(Rp)	(%)					
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	1	-	1.010.000.000,00	1.260.000.000,00	69.718.500,00	5,53	10,00	PAD	Plg		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	1.746.000.000,00	2.196.000.000,00	819.963.650,00	37,34	41,00	PAD	Plg		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	832.000.000,00	832.000.000,00	413.341.190,00	49,68	50,00	PAD	Plg		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	40.000.000,00	150.000.000,00	15.293.000,00	10,20	25,00	PAD	Plg		
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	6	184.000.000,00	484.000.000,00	177.368.800,00	36,65	89,67	PAD	Plg		
14	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	400	204	800.000.000,00	800.000.000,00	216.155.620,00	27,02	51,00	PAD	Plg		
15	Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen (Aplikasi : IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapo SP4N)	8	2	300.000.000,00	725.000.000,00	24.920.000,00	3,44	40,00	PAD	Plg		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	%	100	0,00	39.007.048.176,00	13.500.000.000,00	-	0,00	0,00				
16	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	39.007.048.176,00	-	0,00	0,00	0,00	PAD	Plg		
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit (36 Rumah Dinas Lanud, 1 Pager Wisma Yogyakarta, 1 Pager Wisma Bandung)	38	-	-	13.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pengerasan TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tema/tk	Faktor Penghambat/ Pendorong
								(Rp)	(%)					
vii	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	100	47,22	4.579.079.174,00	4.367.079.174,00	1.129.750.326,00	25,87	47,22				
18	Penyediaan Jasa Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	6	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	10,00	50,00	PAD	Plg		
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulian)	36	18	1.344.959.174,00	1.344.959.174,00	409.026.926,00	30,41	50,00	PAD	Plg		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	5	3.214.120.000,00	3.002.120.000,00	718.723.400,00	23,94	41,67	PAD	Plg		
viii	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	%	100	41,92	13.079.520.000,00	5.115.520.000,00	1.268.007.645,00	24,79	41,92				
21	Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Kendaraan atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Eselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Eselon 1)	Unit (5 Unit untuk 5 Orang Eselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Eselon 1)	6	2	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	197.893.505,00	14,34	50,00	PAD	Plg		
22	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	18	288.000.000,00	658.000.000,00	246.037.200,00	37,39	50,00	PAD	Plg		
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5	561.520.000,00	1.541.520.000,00	426.731.000,00	27,68	41,67	PAD	Plg		
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	4	1	10.850.000.000,00	1.536.000.000,00	397.345.940,00	25,87	26,00	PAD	Plg		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan			Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tema/Isi	Faktor Penghambat/Pendorong
						(Rp)		(%)				
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	%	100	27,59	3.305.340.683,868,00	3.267.031.332,536,00	697.680.568,739,98	21,36	27,59		
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	25,95%	26,14%							Perda APBD TA. 2026
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60%	27,52%							Perda APBD TA. 2026
		Persentase Penurunan SILPA	%	2,50%	-							Untuk Realisasi SILPA Tahun 2025 (LRA Audited sebesar Rp209.726.203.972,76 atau sebesar 1,87% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp11.237.619.654.098,00. SILPA tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,93% jika dibandingkan dengan Realisasi SILPA Tahun 2024 sebesar Rp108.494.651.207,36 atau 0,93% dari Total Belanja sebesar Rp11.613.894.803.146,00. Sedangkan SILPA dari pelaksanaan anggaran tahun berjalan (TA 2026) baru bisa dihitung secara pasti dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran 2026 atau awal tahun 2027 setelah laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran selesai dibuat.
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	100%							Tahun 2026 merupakan Penyusunan LKPD Tahun 2025 telah disampaikan Tepat Waktu, Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 dengan Batas Akhir Pelaporan Keuangan 2026 adalah Paling lambat 31 Maret 2027 wajib diserahkan kepada BPK untuk diaudit
<i>i</i>	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tetsusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	100	24,04	4.070.000.000,00	5.420.648.668,00	1.210.369.243,00	22,33	24,04		
25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAAS, Buku PPAAS)	4	-	372.000.000,00	522.000.000,00	93.373.317,00	17,89	18,60	PAD	Pig

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pengereseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
								(Rp)	(%)					
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub, Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	34	8	895.000.000,00	1.495.648.668,00	256.808.490,00	17,17	23,53	PAD	Plg		
27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	-	2.803.000.000,00	3.403.000.000,00	860.187.436,00	25,28	30,00	PAD	Plg		
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	%	100	14,00	1.036.000.000,00	1.206.000.000,00	139.990.184,00	11,61	14,00				
28	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Peraturan Daerah APBD tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	-	700.000.000,00	850.000.000,00	136.425.083,00	16,05	18,00	PAD	Plg		
29	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan (SK Evaluasi Kab/Kota dan Laporan TPTGR)	18	-	336.000.000,00	356.000.000,00	3.565.101,00	1,00	10,00	PAD	Plg		SK Tim Penyusunan Evaluasi dan Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pergeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaa n (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
								(Rp)	(%)					
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	100	45,45	670.000.000,00	770.000.000,00	11.295.940,00	1,47	45,45				
30	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID, TDF)	44	18	370.000.000,00	420.000.000,00	5.184.100,00	1,23	40,91	PAD	Pig		
31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPd)	179	90	300.000.000,00	350.000.000,00	6.111.840,00	1,75	50,00	PAD	Pig		
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaa an Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD	%	100	58,93	785.000.000,00	855.000.000,00	130.119.300,00	15,22	58,93				
32	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	17	4	350.000.000,00	390.000.000,00	52.958.450,00	13,58	25,00	PAD	Pig		
33	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda dan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	14	13	435.000.000,00	465.000.000,00	77.160.850,00	16,59	92,86	PAD	Pig		
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	26,96	3.298.779.683.866,00	3.258.779.683.866,00	696.188.794.072,98	21,36	26,96				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pengerasan TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
								(Rp)	(%)					
34	Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	34	19	1.716.970.429.335,00	1.716.970.429.335,00	322.702.018.225,98	18,79	55,88	PAD	Pig		
35	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan (Laporan Pencairan)	4	-	50.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	PAD	Pig		
36	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	18	2	1.531.809.254.533,00	1.531.809.254.533,00	373.486.775.847,00	24,38	25,00	PAD	Pig		
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	65,23	2.459.000.000,00	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	65,23				
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6%	3%									
		Asset Management	%	Ya	Ya									
i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, Inventarisasi, Penerbitan dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	65,23	2.459.000.000,00	2.919.000.000,00	721.890.813,00	24,73	65,23				
37	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perumahan dan Buku Pedoman Teknis)	4	1	330.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	50,00	PAD	Pig		Belum ada permintaan pembayaran
38	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan	61	40	400.000.000,00	485.000.000,00	313.399.730,00	64,62	65,57	PAD	Pig		
39	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov, Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penerbitan BMD bermasalah, RKBMd dan 1 Rekap Gabungan)	76	56	1.025.500.000,00	1.250.500.000,00	328.631.381,00	26,28	73,68	PAD	Pig		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Pagu Pengeseran TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
								(Rp)	(%)				
40	Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	60	43	703.500.000,00	753.500.000,00	79.859.702,00	10,60	71,67	PAD	Pig	
Jumlah : 40 sub kegiatan						3.435.440.907.622,00	3.364.662.969.272,00	714.069.642.570,98	21,22	48,36			

Palembang, Juli 2026
 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah ***“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belanja dan Program APBD

a. Belanja Perangkat Daerah

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 900.1.12/035/BPKAD/2026 perihal Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas pada APBD tanggal 28 April 2026, total pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 semula sebesar **Rp3.435.440.907.622,00** berkurang sebesar **Rp70.777.938.350,00** menjadi **Rp3.364.662.969.272,00** yang terdiri atas :

- 1) Belanja Operasi : Rp 91.468.285.404,00
- 2) Belanja Modal : Rp 14.415.000.000,00
- 3) Belanja Tidak Terduga : Rp 10.000.000.000,00
- 4) Belanja Transfer : Rp 3.248.779.683.868,00

b. Program

Belanja tersebut terdiri atas **3 Program, 13 Kegiatan**, dan **40 Sub Kegiatan** dengan program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Indikator Kinerja BPKAD (RPJMD) dan Indikator Kinerja Daerah (Renstra)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

Indikator Kinerja BPKAD (RPJMD) dan Indikator Kinerja Daerah (Renstra)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	5%	5%	5%	5%	5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	- Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	85,49	91	91	92	93

Indikator Kinerja Program BPKAD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	21,85	25,95	26	27	28	29
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	33,20	36,60	40	40,50	41	41,50
	Persentase Penurunan SILPA	%	2	2,50	3	3,50	4	4,50
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

5. Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kewilayahan (Lokasi).

Sebagian besar kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Palembang.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA.

1. Realisasi Belanja

a) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 adalah Rp714.069.642.570,98 atau 21,22%.

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Akhir Tahun	Realisasi di Bulan ini	Target di Akhir Tahun	Realisasi s.d.Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp3.364.662.969.272,00	714.069.642.570,98	100	21,22%	100	46,26
Belanja Operasi	91.468.285.404,00	17.873.555.858,00	100	19,54%	100	
Belanja Modal	14.415.000.000,00	7.292.640,00	100	0,05%	100	
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	-	100	-	100	
Belanja Transfer	3.248.779.683.868,00	696.188.794.072,98	100	21,43%	100	

b) Realisasi Belanja (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer)

1) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp17.873.555.858,00,00 atau 19,54%.

2) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.292.640,00 atau 0,05%.

ii. Realisasi Keuangan

- 1. Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 39 sub kegiatan
- 2. Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 0 sub kegiatan
- 3. Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 91-100% : 1 sub kegiatan

iii. Realisasi fisik

- 1. Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 33 Sub Kegiatan
- 2. Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 5 Sub Kegiatan
- 3. Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 91-100% : 2 Sub Kegiatan

3) Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Terduga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 belum ada realisasi atau 0%.

4) Realisasi Belanja Transfer

Realisasi Keuangan Belanja Transfer Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp696.188.794.072,98 atau 21,43%.

- c) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja BPKAD (RPJMD) dan Indikator Kinerja Daerah (Renstra) BPKAD Prov. Sumsel

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					REALISASI PADA TAHUN KE	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	5%	5%	5%	5%	5%	5,37%	-
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%	-
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	- Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	85,49	91	91	92	93	-	-

Berdasarkan tabel pada Indikator Kinerja BPKAD (RPJMD) dan Indikator Kinerja Daerah (Renstra) di atas, realisasi Indikator Kinerja BPKAD (RPJMD) dan Indikator Kinerja Daerah (Renstra) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan progres masing-masing indikator yaitu :

1) Indikator Tujuan : WTP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026 saat ini belum ada karena tahun anggaran 2026 masih berjalan dan baru akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2027.

2) Indikator Sasaran :

a. Indikator "Persentase Penetapan Dokumen APBD (Induk dan Perubahan) yang Tepat Waktu"

Sesuai dengan ketentuan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, jadwal penetapan Perda APBD tidak dilakukan pada Triwulan II.

b. Indikator "Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)"

Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00

c. Indikator "Indeks Pengelolaan Aset"

Nilai Sementara Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025 dengan nilai yaitu 2,22 yang masih menggunakan kertas kerja Tahun 2024 dengan data tahun 2025. Sehingga penentuan hasil penilaian untuk Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 masih menunggu kertas kerja terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Selanjutnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2026 dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Sehingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2027.

Indikator Kinerja Program BPKAD Prov. Sumsel

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET						REALISASI	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	S.d TW 2 Tahun 2026
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4	5	6	7	8	9	1,57	3
	Aset Management	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	21,85	25,95	26	27	28	29	21,08	26,14
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	33,20	36,60	40	40,50	41	41,50	34,08	27,52
	Persentase Penurunan SILPA	%	2	2,50	3	3,50	4	4,50	0,93 (Kenaikan)	-
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	93,96	45,60

Program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 4 (empat) indikator yaitu :

- 1) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terealisasi berdasarkan Perda Induk TA. 2026 sebesar 26,14%. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- 2) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur berdasarkan Perda Induk TA. 2026 dengan capaian 27,52% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 36,60%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan.

Terkait pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan langkah sebagai berikut :

- Perencanaan Anggaran Sejak Awal
- Pemetaan Sumber Pendanaan
- Prioritas Belanja Daerah
- Optimalisasi Pendapatan daerah
- Monitoring dan Evaluasi Berkala
- Penguatan Koordinasi antar Perangkat Daerah
- Pengawasan Regulasi dan Kepatuhan

- 3) Persentase Penurunan SILPA dengan target 2,50%

SILPA Sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1.212.239.403.547,20 atau 12,44% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.747.926.839.611,00. Angka ini terus berubah setiap hari mengikuti dinamika transaksi fiskal harian.

SILPA dari pelaksanaan anggaran tahun berjalan (TA 2026) baru bisa dihitung secara pasti dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran 2026 atau awal tahun 2027 setelah laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran selesai dibuat.

- 4) Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 atas Laporan Keuangan (LK) TA 2025 telah berhasil direalisasikan sebesar 100%. Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2025 telah disusun secara komprehensif dan diserahkan secara resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan sebelum batas akhir regulasi pada 31 Maret 2026.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator yaitu : Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap sebesar 3%.

- Asset Management

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan output yang telah dihasilkan yaitu Kerjasama dengan Kejati Sumsel (dalam hal pengamanan aset), BPN Kota Palembang (dalam hal percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), DJKN (dalam hal Penilaian BMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), dan SK Gubernur yang telah terbit diantaranya terkait Hibah, Sewa Menyewa, Pinjam Pakai, SK Gubernur Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang BMD dan Penghapusan BMD.

- c. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi baru mencapai 45,60%. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

III. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD

- Pada Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas sejak tahun 2014.
- Penghargaan sebagai Badan Publik terbaik dalam monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang terima pada tanggal 13 Februari 2026



IV. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah antara lain :

1. Dalam Pemenuhan Dokumen Penertiban Barang Milik Daerah, bahwa dalam penertibannya memerlukan kerja tim dan proses litigasi yang memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Belum terbentuknya Tim Pengawasan BMD yang telah dilakukan kontrak perikatan pemanfaatan.

V. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan. Selanjutnya laporan yang lebih rinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 6 Juli 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)
 TRIWULAN II TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP		Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
		a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	-		
		- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026						Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
		- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027						Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
		b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Induk (Budget Execution)	%	5	-	-		Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	-		Nilai Indeks Pengelolaan Aset dikeluarkan secara final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses. Adapun Indeks Pengelolaan Aset (IPA) BPKAD untuk Tahun Anggaran 2026 secara resmi akan diperoleh pada tahun anggaran berikutnya (Tahun 2027).

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	-		Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena proses evaluasi dan penilaiannya baru berjalan saat ini (pertengahan tahun 2026)

Palembang, 6 Juli 2026
 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	